

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi disambut dengan antusias. Apalagi setelah di berlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan otonomi daerah bukan lagi hanya sekedar pemindahan kewajiban dari pemerintah pusat ke daerah, akan tetapi lebih mendekati makna pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah.

Pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah bertujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin proses demokrasi lokal. Pemberian kewenangan tersebut didasarkan pada tuntutan akuntabilitas publik yaitu tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat yang seharusnya dilayani. Perwujudan nyata dari akuntabilitas publik ditunjukkan dalam bentuk kinerja, termasuk didalamnya kinerja institusi dan aparat pemerintah..

Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah menjadikan Pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam peyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, Pemerintah daerah harus mampu memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Dewasa ini banyak sekali permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Salah satu diantaranya adalah permasalahan sampah.

Sampah merupakan masalah yang sangat krusial baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, khususnya Kabupaten Bandung. Hal ini dikarenakan sampah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dampak besar yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung yang ditimbulkan karena sampah adalah banjir.

Banjir sering kali terjadi di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini dikarenakan meningkatnya produksi sampah namun tidak diiringi dengan pengelolaan sampah yang baik. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Bandung dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola sampah. Pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melayani masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena secara langsung maupun tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat, serta menciptakan lingkungan bersih.

Pengelolaan sampah sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Sedangkan Penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah. Dan lebih teknis di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah.

Pemerintahan Kabupaten Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha pelestarian lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sampah serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah. Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 tahun 2016. Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Bidang yang bertanggungjawab langsung untuk mengelola sampah adalah bidang pengelolaan sampah. Dimana bidang pengelolaan sampah tersebut terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengangkutan sampah yang terdiri dari empat wilayah pelayanan, yaitu wilayah Soreang, Baleendah, Ciparay, dan Rancaekek. Dan masing-masing dari UPT tersebut membawahi beberapa kecamatan dalam lingkup kerjanya. Setiap UPT harus melaksanakan kinerja secara optimal sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien dan agar tidak terjadi dampak yang mengganggu kehidupan masyarakat seperti bencana banjir, mengganggu lalu lintas (karena sampah meluber kejalan), memicu penyakit, bau sampah yang mengganggu masyarakat sekitar dll. Adapun kinerja dari setiap UPT adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekonsiliasi Data Kuantitatif Sampah Kabupaten Bandung

No	Wilayah pelayanan UPT Pengangkutan sampah	Luas Wilayah (Km ²)	jumlah penduduk	Analisis timbunan Sampah				rata-rata jumlah ritase
				volume sampah perhari (Ton)	Volume sampah perbulan (Ton)	sampah yang terangkut (Ton)	Presentase sampah yang terangkut	
1	Soreang	553,84	836.213	292,674	8.780,22	1.316,39	14,99%	452
2	Baleendah	412,96	981.293	343,452	10.303,56	1.059,01	10%	339
3	Ciparay	507,14	931.916	326,170	9.785,10	772,103	7,89%	255
4	Rancaekek	285,46	773.302	270,655	8.119,65	1.423,86	17,53%	492
Jumlah		1.759,40	3.522.724	1.232,951	36.988,53	4.571,36	12,33%	1538

Sumber: Bidang Pengelolaan Sampah, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Tonase sampah yang dapat terangkut masih sangat rendah, Terutama di wilayah kerja UPT pengangkutan sampah Ciparay. Dimana presentase sampah yang terangkut oleh UPT pengangkutan sampah Ciparay paling rendah jika dibandingkan dengan UPT pengangkutan sampah lainnya. Jika dilihat dari jumlah ritasenya pun UPT pengangkutan sampah ciparay memiliki jumlah ritase yang paling rendah dari UPT penangkutan sampah lainnya.

Padahal jika dilihat dari luas wilayahnya, wilayah Kerja UPT pengangkutan sampah Soreang memiliki cakupan wilayah yang lebih luas dari pada Ciparay. Jika dilihat dari jumlah penduduk, di wilayah kerja UPT pengangkutan sampah Rancaekek memiliki jumlah penduduk lebih sedikit dari pada di wilayah kerja UPT pengangkutan sampah Ciparay. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pengelolaan

sampah yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup, khususnya di UPT pengangkutan sampah Ciparay belum optimal.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan dalam latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai pengelolaan sampah di wilayah kerja UPT pengangkutan sampah Ciparay dengan judul “Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Dalam Mengelola Sampah (Studi Kasus Di Wilayah Kerja UPT Pengangkutan Sampah Ciparay)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis menentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Jumlah sampah yang terangkut masih rendah jika dibandingkan dengan total produksi sampah
2. Persentase sampah yang terkelola masih rendah
3. Jumlah ritase di wilayah kerja UPT pengangkutan sampah paling sedikit jika dibandingkan dengan wilayah kerja UPT lainnya

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja UPT pengangkutan sampah Ciparay dalam mengelola sampah?

2. Apa saja hambatan dalam melakukan kinerja pengelolaan sampah di wilayah kerja UPT pengangkutan sampah Ciparay?
3. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di wilayah kerja UPT pengangkutan sampah ciparay?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja UPT pengangkutan sampah Ciparay dalam mengelola sampah.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan kinerja pengelolaan sampah di wilayah kerja UPT pengangkutan sampah Ciparay.
3. Untuk mengetahui upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di wilayah kerja UPT pengangkutan sampah ciparay.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan memiliki kegunaan bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan secara teoritis agar dapat mengembangkan teori mengenai ilmu administrasi publik terutama yang berhubungan dengan Kinerja organisasi.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

Seiring dengan berjalannya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis serata mendapat pengetahuan baru terutama mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam mengelola sampah di wilayah kerja UPT Pengangkutan Sampah Ciparay.

b) Bagi Instansi

Penulis berharap penelitian ini mampu menjadi referensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak sehingga dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam mengelola sampah khususnya di wilayah UPT Pengangkutan Sampah Ciparay.

c) Bagi Umum

Penulis juga berharap penelitian ini bisa memberi pengetahuan serta informasi bagi banyak pihak yang memiliki kepentingan dengan masalah yang diteliti.

d) Bagi Penulis Selanjutnya

penelitian ini diharapkan bisa di jadikan sebagai acuan serta studi lanjutan dalam penelitian selanjutnya tentunya dalam bidang yang sama dengan lebih mendalam lagi.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti mengenai kinerja UPT pengangkutan sampah Ciparay dalam mengelola sampah, kemudian hambatan dalam melakukan kinerja pengelolaan sampah di wilayah kerja UPT penangkutan sampah Ciparay, serta upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di wilayah kerja UPT pengangkutan sampah Ciparay. Maka dari itu, dalam membahas permasalahan tersebut di perlukan landasan teori yang relevan dengan pembahasan yang akan dibahas. Adapun landasan teori yang penulis anggap mampu untuk menjawab rumusan masalah serta relevan untuk menggambarkan kinerja UPT pengangkutan sampah Ciparay dalam melakukan pengelolaan sampah yaitu menggunakan teori kinerja sektor publik dari Selim dan Woodward dalam Nawawi (2014: 217) yaitu:

1. Pelayanan, yang menunjukkan seberapa besar pelayanan yang diberikan
2. Ekonomi, yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah dari pada yang direncanakan
3. Efisiensi, yang menunjukkan perbandingan hasil yang dicapai dengan pengeluaran
4. Efektivitas, yang menunjukkan hasil yang seharusnya dengan hasil yang dicapai
5. Equality, yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dan kebijakan yang di hasilkan.

Menurut Amstrong dan Baron (1985:5) dalam Hayat (2017: 58) menyatakan bahwa “kinerja adalah capaian kerja yang berhubungan dengan tujuan organisasi, konsumen dan ekonomi. Pada sudut pandang yang lain, kinerja dimaknai sebagai apa dan bagaimana cara mengerjakan suatu hal serta bagaimana hasil dari pekerjaan itu”. Dari pengertian tersebut kinerja menunjukkan capaian kerja yang dilakukan

oleh organisasi maupun pegawai. Sedangkan menurut Nawawi (2014: 214) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perubahan mengatakan bahwa

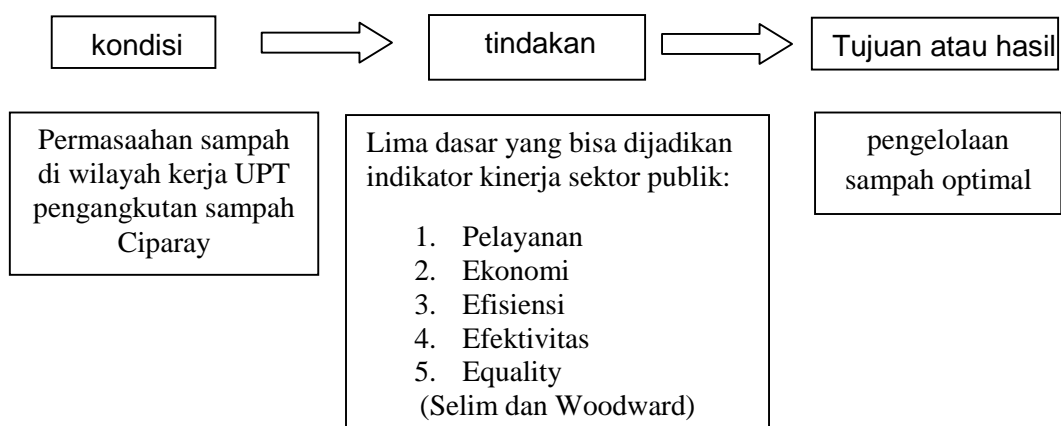
“pada dasarnya kinerja bisa dilihat dari dua sisi, yaitu kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Kinerja karyawan dilihat dari hasil perorangan dalam organisasi, sedangkan kinerja organisasi merupakan keseluruhan kerja yang di capai oleh organisasi”

Teori ini akan memudahkan penulis untuk mengetahui bagaimana kinerja UPT pengangkutan sampah Ciparay dalam mengelola sampah dengan melihat cakupan pelayanan UPT pengangkutan sampah ciparay, tingkat ekonomi, efisiensi pengelolaan sampah, efektivitas pengangkutan sampah, dan yang terakhir yaitu tingkat equality yang dilihat dari pemerataan layanan yang dilakukan oleh UPT pengangkutan sampah Ciparay serta kebijakan-kebijakan apa saja yang di keluarkan oleh dinas lingkungan hidup untuk mengatasi permasalahan sampah.

Melalui lima indikator tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari UPT pengangkutan sampah ciparay dalam mengelola sampah. Sehingga permasalahan sampah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dapat terkendali. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



G. Proposisi

Berdasarkan pada kerangka pemikiran penulis menyusun proposisi sebagai berikut: **“kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam mengelola sampah di wilayah kerja UPT Pengangkutan Sampah Ciparay masih belum optimal dikarenakan belum sesuai dengan lima dasar yang bisa dijadikan indikator kinerja sektor publik yaitu pelayanan, ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan equality”**.

